

## **EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN TEGAL**

**Aulia Lorie Pangestika<sup>1</sup>, Yeni Priatna Sari<sup>2</sup>**  
<sup>12</sup>D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal  
 Jln. Mataram No. 09 Tegal  
 Telp/Fax (0283) 352000

### **Abstrak**

Efektivitas penerapan sistem informasi merupakan hasil yang di peroleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan SIMDA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Tegal. Objek yang diteliti adalah hasil penerapan SIMDA. Model analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan mengukur seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dengan melihat makin besar target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya.

Hasil analisis efektivitas sistem informasi manajemen daerah pada dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Tegal diperoleh bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dipahami oleh masyarakat, para wakil rakyat, investor dan pemerintah, dan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relevan, Andal dan dapat diperbandingkan, pada tahun 2008 sebelum diterapkannya SIMDA Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2008 dapat diterbitkan pada 23 Januari tahun 2008 setelah adanya SIMDA pada tahun 2014 Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2015 dapat diterbitkan pada 31 Desember 2014. Dan sistem informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Berdasarkan hasil dengan pendekatan fenomenologi adalah efektif.

**Kata Kunci** : *Efektivitas, SIMDA, DPPKAD, Kabupaten Tegal*

### **1. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang tergolong negara berkembang yang memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor publik, swasta, dan koperasi. Perkembangan pada sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, dimana pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan. Menurut Abdullah dalam Halim (2008:251) yang dimaksud sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan bidang sumber daya.

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor publik. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ada negara tanpa kehadiran sektor publik. Negara kapitalis penganut pasar bebas sempurna sekalipun masih membutuhkan peran sektor publik, apalagi

negara sosialis yang menjadikan sektor publik sebagai sektor terpenting dalam sistem ekonomi, sosial dan politiknya. Negara Republik Indonesia yang bukan merupakan negara kapitalis maupun sosialis tetapi negara Pancasila juga menjadikan sektor publik sebagai sektor penting negara. Sektor publik memiliki peran yang tidak kecil dalam suatu negara yang dapat berdampak pada sektor yang lain yaitu sektor swasta maupun sosial. Kegagalan sektor publik dalam bentuk kegagalan pemerintah, kelumpuhan birokrasi, mafia hukum, kekacauan politik, perang, terorisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat mengganggu sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk kemajuan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa maka pembangunan sektor publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan

Sejak diberlakukannya UU mengenai Otonomi Daerah di Indonesia, Pemerintah

Daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah [1] yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah [2] sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" Undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan dan Sistem Informasi bagi Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah [3] yang merupakan pengganti PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah [4] yang isinya sebagai berikut:

"Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik" Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengembal amanat pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah menerapkan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sejak tahun 2011 yang sebelumnya menggunakan sistem manual atau penyusunan menggunakan Microsoft Excel. Tujuan dari penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

## 2. Metode Penelitian

### A. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Studi Pustaka

## 4) Studi Dokumentasi

**B. Jenis dan Sumber Data**

- 1). Data Primer
- 2). Data Sekundet

**C. Metode Analisis Data****1) Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dan menurut beberapa ahli mengenai pengertian penelitian kualitatif adalah menurut Creswell dalam Herdiansyah, 2010:8 menyebutkan bahwa

*“Qualitative rresearch is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditionsof inquiry that explore a social or human problrm .The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conductsthe study in a natural setting”* dan menurut Sugiyono (2011:15) menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dan sipeneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai penelitian kualitatif, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitaian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah tentang riset yang bersifat deskriptif

**2) Metode Analisis Fenomenologi**

Fenomenologi merupakan salah satu metode penelitian dalam studi kualitatif. Kata fenomenologi (*phenomenology*) berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak.

Menurut Creswell (1998:54) pendekatan fenomenologi adalah menunda semua penelitian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Dan pendapat lain Istilah fenomenologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* (penampakan diri) dan *logos* (akal). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakan diri pada pengalaman subjek. Dapat di simpulkan pendekatan fenomenologi adalah ilmu-ilmu mengenai penampakan diri pada fakta keadaan dilapangan atau kajian terhadap fenomena-fenomena yang nampak.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam dari efektivitas penerapan SIMDA.

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah :

- a. Observasi langsung melihat keadaan penerapan yang ada pada objek
- b. Data dari wawancara, mewawancarai langsung informan yang berpengaruh pada penerapan SIMDA
- c. Dari data observasi langsung dan wawancara pada informan diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- d. Data yang sudah diorganisir lalu dikembangkan untuk menarik kesimpulan dari hasil observasi.

**3.Hasil dan Pembahasan****a) Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Ciri utama SIMDA adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pegawai yang terkait dengan proses

pengoperasian SIMDA pada DPPKAD Kab.Tegal telah mengerti dan paham tentang tujuan dan penerapan SIMDA. Hal ini terbukti dari wawancara dengan staf DPPKAD Kab.Tegal, diantaranya dengan Kepala Seksi Fasilitas Penyiapan yang bertugas dalam pengoperasian SIMDA yang mengatakan “Yang jelas SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengolah keuangan daerah” tambahnya “Adanya SIMDA membuat pengolahan keuangan Daerah lebih cepat dan lebih efisien tidak perlu diulang untuk pembuatan laporan keuangan, kita tinggal *input* lalu SIMDA bekerja secara otomatis itu lebih memudahkan kita” Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa “Sebelum dilakukan penerapan, terlebih dahulu dilakukan kajian atau diklat khusus antara BPKP dan pengguna sistem yaitu kami sendiri. Kajian berisi mengenai manfaat atau tujuan penggunaan SIMDA keuangan serta prosedur pelaksanaannya”. Ungkapan lain mengenai *output* yang dihasilkan oleh SIMDA. Berikut hasil wawancaranya :

“Mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Semua itu diolah dengan menggunakan media komputerisasi, itulah yang disebut SIMDA, seperti bagian lain kami hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan mengawasi proses pengolahannya sampai menghasilkan laporan yang kita inginkan”.

Berikut hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja SIMDA terkait proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah *output* adalah sebagai berikut :

“RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA” Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa :

“Kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk penerbitan PERBUP (Peraturan Bupati) tentang penjabaran APBD yang akan

dialokasikan, dan dengan adanya SIMDA kami tidak perlu mengulang pembuatan laporan membuat kami lebih cepat dalam proses perealisasi anggaran ke masing-masing dinas”. Tambahnya “Sejak adanya sistem ini diterapkan kami merasa sangat terbantuan dalam penyusunan RKA dan DPA. Begitu pula dengan bagian-bagian lainnya, pekerjaan lebih mudah namun tetap memerlukan pengawasan.

Pendapat beberapa pegawai tersebut telah sesuai dengan pengertian SIMDA secara umum menurut BPKP (2007;21) [5] yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah dan Ungkapan hasil wawancara diatas juga membuktikan bahwa para pegawai merasa terbantu dengan adanya sistem ini dan bisa di nyatakan sistem ini efektif dalam penerapannya .

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menganalisis efektivitas suatu sistem. Salah satu kriteria yang dapat digunakan dalam menganalisis efektivitas sistem adalah pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar prosentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”

Berikut ini analisis lebih lanjut mengenai efektivitas sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) pada DPPKAD berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang akan penulis jabarkan (kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu) penjelasan mengenai hasil penelitian sebagai berikut :

#### **b) Kuantitas SIMDA**

Kuantitas Sistem Informasi dapat diukur dari banyaknya atau jumlahnya (Wikipedia Indonesia), analisis efektivitas SIMDA di lihat dari segi kuantitas terdiri dari hasil keluaran yang dihasilkan oleh SIMDA pada bagian penganggaran diantaranya adalah RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), dan Perbup (Peraturan Bupati). Berikut hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja

SIMDA terkait proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah *output* adalah sebagai berikut :

“RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA”

Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa :

“Kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk penerbitan PERBUP (Peraturan Bupati) tentang penjabaran APBD yang akan dialokasikan, dan dengan adanya SIMDA kami tidak perlu mengulang pembuatan laporan membuat kami lebih cepat dalam proses perealisasi anggaran ke masing-masing dinas”. Tambahnya “Sejak adanya sistem ini diterapkan kami merasa sangat terbantu dalam penyusunan RKA dan DPA. Begitu pula dengan bagian-bagian lainnya, pekerjaan lebih mudah namun tetap memerlukan pengawasan. Output yang dihasilkan SIMDA dapat dilihat di lampiran.

#### c) **Kualitas SIMDA**

Bagaimana idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika *output* yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian ini, yang dimaksud kualitas SIMDA menurut (fulcra.asia) yaitu suatu informasi yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Berikut ini analisis lebih lanjut mengenai efektivitas SIMDA dari segi kualitas berdasarkan karakteristik tersebut.

#### d) **Dapat Di Pahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna laporan. Dijelaskan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,[6] dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
- d. Pemerintah.

Kualitas informasi SIMDA mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, para Wakil Rakyat, Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah terbukti alur pembuatan RKA sendiri harus disetujui oleh Para Wakil Rakyat setelah disetujui baru membuat DPA dan diterbitkan Peraturan Bupati yang dapat dilihat oleh semua elemen pemerintah dan masyarakat.

#### e) **Relevan**

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan.

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Seperti hasil wawancara :

“Sudah jelas setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kalo kita hanya menginput data kedalam sistem, dan berarti sitem saling berhubungan”.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA dapat dikatakan Relevan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki manfaat umpan baik yaitu memungkinkan pengguna laporan keuangan mengoreksi ekspektasi laporan dimasa lalu (terbukti dengan hasil Audit oleh BPK)
- b. Memiliki manfaat prediktif yaitu informasi yang dihasilkan SIMDA membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Lengkap yaitu Laporan yang dihasilkan SIMDA dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dengan sistem informasi langsung yang bekerja sendiri dari hasil *entry*.

f) **Andal**

Suatu laporan keuangan dikatakan Andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan bahwa laporan bersifat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Laporan Keuangan yang disajikan SIMDA andal bisa dilihat dari :

- 1) Penyajian jujur setiap transaksi dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban
- 2) Dapat diverifikasi yaitu laporan keuangan yang di hasilkan SIMDA telah di uji oleh BPK, dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja (lampiran)

g) **Dapat Diperbandingkan**

Laporan Keuangan dapat dibandingkan adalah Identifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan laporan keuangan antar periode hendaknya dapat dibandingkan oleh pengguna laporan keuangan. Laporan Keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dibandingkan antar periode di tahun sebelumnya, dan antar instansi ini untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan, artinya laporan keuangan yang dihasilkan simda telah memenuhi karakteristik dapat diperbandingkan.

h) **Ketepatan Waktu SIMDA**

Penggunaan SIMDA menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh DPPKAD Kab.Tegal menjadi lebih baik, baik dari segi ketepatan waktu. Analisis efektivitas di lihat dari segi ketepatan waktu dapat dibuktikan dari hasil wawancara seperti hasil wawancara ini “Setelah diterapkannya SIMDA, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan termotivasi atau tidak malas-malasan untuk melaksanakan tugasnya, itu dikarenakan mereka merasakan sekali dengan adanya program ini sangat terbantu menyelesaikan tugas, dan penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat. Perbandingan saja mengenai ketepatan waktu jika pada tahun 2008 Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2008 bisa diterbitkan pada awal tahun atau per 23 Januari itu sebelum adanya SIMDA, tetapi setelah adanya

SIMDA pada tahun 2014 per 31 Desember Peraturan Bupati sudah diterbitkan untuk tahun anggaran 2015, ini pembuktian efektivitas yang dihasilkan SIMDA”.

**4. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). SIMDA memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem. Selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan, dikerjakan secara otomatis oleh sistem.
- 2). SIMDA menyebabkan informasi yang dihasilkan DPPKAD Kab.Tegal menjadi lebih baik dari segi ketepatan waktu.
- 3). Output yang dihasilkan SIMDA yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dan Penjabaran mengenai APBD yang di keluarkan oleh PerBup(Peraturan Bupati)
- 4). Kualitas informasi yang dihasilkan SIMDA antara lain:
  - a. Dapat di pahami
  - b. Relevan
  - c. Andal
  - d. Dan Dapat diperbandingkan
- 5). Terintegrasi, dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut:
  - a) Pengendalian transaksi terjamin
  - b) Sesuai dengan SAP.
  - c) Mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

**5. Daftar Pustaka**

- [1]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah .1999.
- [2]. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah . 2004Winarno.2006. Informasi dan

- Manajemen. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- [3]. PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. 2005.
- [4]. PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. 2001
- [5]. *BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)*. 2014 Debuti Pengawas Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Pedoman Pengoperasian)
- [6]. Bodnar, George H.J. dan Hopwood, William S. 2004. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 9. ANDI. Yogyakarta.
- [7]. *Dian, Mitami*. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada pemerintah Kabupaten Pangkep Makasar : Universitas Hasanuddin makasar.
- [8]. *Ferdian*. 2010. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [9]. Fulcra.asia diakses pada 6 juni 2015
- [10]. Henley, et al. 2010. Akuntansi Sektor Publik.
- [11]. Jogiyo. 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.
- [12]. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- [13]. Mcleod, Raymond dan P. Schell, George. 2008. Management Information Systems Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat
- [14]. Mcleod, Raymod. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Salemba Empat
- [15]. Miarso. 2007. Teknologi dan Informasi. Jakarta : Salemba Empat
- [16]. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- [17]. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standart Akuntansi Pemerintahan.
- [18]. Yohanes swim. 2011. Management Information Systems.
- [19]. [www.bpk.go.id/assets/files/strage/2013/12](http://www.bpk.go.id/assets/files/strage/2013/12) diakses pada 11 Februari 2015.
- [20]. [www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id) diakses pada 6 April 2015